

Analisis Peran Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksaan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Silvana Garing¹, Heince R. N. Wokas², Peter M. Kapojos³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 28, 2025
Revised Oktober 29, 2025
Accepted November 6, 2025

Kata Kunci:

Kompetensi APIP,
Kinerja Pemeriksaan,
Pengetahuan,
Keterampilan,
Perilaku

Keywords:

*APIP Competence,
Audit Performance,
Knowledge,
Skills,
Behavior*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kompetensi APIP dianalisis berdasarkan indikator pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Sementara itu, kinerja pemeriksaan dianalisis berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, dan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor memiliki kompetensi pengetahuan yang memadai, dibuktikan melalui keikutsertaan dalam pelatihan seperti Diklat Auditor dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Dalam hal keterampilan, auditor mampu mengolah data pemeriksaan secara sistematis dengan bantuan teknologi informasi serta menerapkan teknik komunikasi yang efektif saat berinteraksi dengan auditee. Dari aspek perilaku, auditor menunjukkan integritas tinggi, menjaga independensi, dan mematuhi kode etik APIP. Kinerja auditor dinilai baik dalam hal kualitas hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kuantitas pekerjaan yang sesuai dengan target waktu, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan profesional dan penuh komitmen. Meskipun demikian, auditor menghadapi tantangan seperti beban kerja tinggi, serta risiko psikologis dan hukum dalam pelaksanaan tugas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the competencies of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in improving audit performance at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. APIP competencies are analyzed based on indicators of knowledge, skills, and behavior. Meanwhile, audit performance is assessed through indicators of quality, quantity, and responsibility. This research employs a qualitative approach with a case study method, using in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that auditors possess adequate knowledge competencies, as evidenced by participation in training such as Auditor Training (Diklat Auditor) and certification of the Functional Auditor Position (JFA). In terms of skills, auditors are capable of processing audit data systematically using information technology and applying effective communication techniques when interacting with auditees. In terms of behavior, auditors demonstrate high integrity, maintain independence, and comply with the APIP code of ethics. Auditor performance is considered good in terms of the quality of accurate and accountable audit results, the quantity of work in line with time targets, and a strong sense of responsibility in

carrying out tasks professionally and with commitment. However, auditors still face challenges such as high workloads, as well as psychological and legal risks during audit implementation.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Silvana Garing
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: anagaring06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan. APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. APIP sendiri beranggotakan yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari APIP, memiliki 137 pegawai diwajibkan untuk memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Dalam Peraturan BPKP No 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Auditor adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas JFA (jabatan fungsional auditor). Dengan memiliki beberapa hal tersebut maka dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja ialah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab selama periode waktu tertentu [1].

Dalam konteks pemerintahan, kompetensi yang baik memiliki keterkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi pemerintahan dan akuntansi keperilakuan sangat penting dalam penelitian ini, penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan akuntansi keperilakuan di instansi pemerintahan khususnya pegawai Inspektorat dapat mempengaruhi pengetahuan, keterampilan serta perilaku agar lebih bertanggung jawab sebagai pegawai pemerintahan.

Beberapa aspek utama yang mendukung jalannya pemerintahan yang baik yaitu pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah adalah Inspektorat Pemerintah Provinsi. Para pegawai Inspektorat akan meningkatkan kualitas pemeriksaan yang mereka lakukan, mencermati dan teliti mengidentifikasi masalah, potensi risiko, dan pelanggaran.

Selain itu, kepercayaan dalam hasil pemeriksaan juga akan meningkat, karena pegawai Inspektorat yang kompeten dapat memberikan bukti yang kuat dan berbasis data untuk mendukung temuan mereka.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif. Masih banyak temuan yang ditemukan seperti kurangnya produktivitas dan ketepatan waktu yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan [2], dan masih kurangnya pengetahuan audit dan pengalaman audit [3]. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat mendukung pegawai Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat potspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi [4]. Sedangkan penelitian studi kasus menurut Harahap [5] ialah penelitian yang digunakan untuk mempelajari secara intensif mengenai interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan yang ada dilapangan pada suatu unit penelitian misalnya unit sosial atau unit pendidikan, dimana penelitian ini relatif kecil namun fokus dan variabel yang diteliti cukup jelas.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil data yang diperlukan lalu menganalisis data tersebut dan mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan yang jelas serta akurat sesuai dengan fakta yang diperoleh dari sumber data yaitu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.2 Jenis dan Sumber Data

2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai dalam instansi serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Sejarah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Struktur Organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Kode Etik APIP
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemeriksaan
6. Hasil Wawancara dengan Pimpinan dan beberapa Pegawai Pemeriksa yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono [6] yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contoh dari data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai pemeriksa internal daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono [6] teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian dan secara langsung memerhatikan perilaku dan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian bertempat di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi atau pihak-pihak yang terkait yaitu seperti pegawai pemeriksa di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono [6] dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil dokumen-dokumen di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.4 Metode dan Proses Analisis Data

2.4.1 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperjelas gambaran penelitian yang dilakukan.

2.4.2 Proses Analisis Data

1. Pengumpulan data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data, dimana pada tahap ini akan dilakukan peninjauan langsung pada objek penelitian yaitu di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta melakukan kegiatan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Menganalisis Data

Pada tahap ini akan dianalisis data berupa:

- a. Indikator kompetensi
- b. Indikator kinerja pemeriksaan

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk menganalisis peran kompetensi APIP dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan. Analisis didasarkan pada tiga indikator kompetensi, yaitu: Pengetahuan, Keterampilan, dan Perilaku. Serta indikator Kinerja

Pemeriksaan, yaitu: Kualitas, Kuantitas, Tanggung jawab. Dengan 3 (tiga) informan, yaitu: informan 1 (Kusno), Informan 2 (Art Bago), dan Informan 3 (Alfrid G. Natan).

3.1 Indikator Kompetensi

3.1.2 Kompetensi Pengetahuan

Para auditor menunjukkan penguasaan terhadap standar audit dan akuntansi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh informasi bahwa sebagian besar auditor telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pendidikan yang relevan.

“Ya, karena itu adalah suatu keharusan. Pengaruhnya yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai audit dan lain sebagainya.” (informan 1)

“Ya, pengaruhnya tentu sangat membantu pekerjaan, karena pekerjaan fungsional harus memiliki ilmunya.” (informan 2)

Keterangan ini selaras dengan peraturan BPKP No. 5 Tahun 2023 yang mewajibkan auditor mengikuti pelatihan JFA dan Diklat Auditor sebagai prasyarat untuk profesionalisme. Ketika ditanya mengenai penerapan standar akuntansi dan audit, semua informan menjawab tidak mengalami kesulitan. “Tidak ada kesulitan karena standar audit sangat jelas, mekanismenya pertama harus ada surat-surat tugas, kemudian ada program kerja audit, ada permintaan dokumen, kemudian ketika hasil pemeriksaan menjadi barang temuan harus memenuhi kriteria seperti (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan diberikan rekomendasi).” (informan 1)

“Sampai saat ini belum ada kesulitan karena standar audit yang kami gunakan masih 7 atribut itu.” (informan 3)

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah matang dan konsisten dengan teori akuntansi pemerintahan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

3.1.3 Kompetensi Keterampilan

Dari aspek keterampilan, hasil wawancara yang ditemukan yaitu para auditor mengolah data berdasarkan kategori objek pemeriksaan dan melakukan analisis mendalam. Informan 3 menjelaskan:

“Cara mengolahnya berdasarkan informasi dan data-data yang kami dapat, kami susun lalu petakan berdasarkan urgensi untuk kami jadikan sebagai suatu rekomendasi yang bila mana memang melanggar dari tata cara aturan, dan juga mana yang boleh untuk diperbaiki.” (informan 3)

Penggunaan teknologi pun menjadi keharusan. Teknologi digunakan hampir di seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan akhir.

“Hal-hal ini harus memakai teknologi berupa komputer.” (informan 2)

“Sering, teknologi berupa komputer merupakan keharusan dalam mengolah data.” (informan 3)

Auditor juga memanfaatkan teknik komunikasi yang efektif dalam melakukan klarifikasi dengan auditee guna memperoleh bukti audit yang sah. Informan 2 menegaskan :

“Kami menggunakan strategi teknik komunikasi untuk menggali informasi, kemudian meminta pembuktian berupa dokumen.” (informan 2)

Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan beberapa tantangan teknis yang dihadapi auditor. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak auditee terhadap sistem keuangan dan tata kelola yang baik. Informan 1 dan 3 mengatakan:

“Tidak semua auditee mengerti tentang akuntansi, untuk itu kami memberikan pengetahuan kepada mereka, jika tetap melanggar maka kami akan memberikan TGR (tuntutan ganti rugi).” (informan 1)

“Saya pernah mengalami kesulitan, auditee tidak menggubris permintaan data. Kami layangkan surat kedua dan tetap lanjutkan prosedur.” (informan 3)

Hal ini menunjukkan pentingnya keterampilan interpersonal dan ketegasan prosedural. Menurut akuntansi keperilakuan [7], keberhasilan pemeriksa juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap perilaku dan respon manusia, khususnya dalam dinamika antara auditor dan auditee.

3.1.4 Kompetensi Perilaku

Kompetensi perilaku erat kaitannya dengan integritas dan etika, yang merupakan pondasi dalam profesi auditor. Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan secara tegas menyatakan komitmen menjaga integritas:

“Itu adalah harga mati. Kami harus menjaga integritas.” (informan 2)

“Kami sangat menjaga integritas sehingga sangat tidak mungkin melakukan pelanggaran seperti suap atau pemalsuan laporan.” (informan 3)

Selain itu, Auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga menjaga kerahasiaan informasi hasil audit. Seperti yang dikatakan informan 1 dan 3:

“Wajib menjaga kerahasiaan. Laporan pemeriksaan hanya diketahui yang bersangkutan dan gubernur.” (informan 1)

“Menjaga integritas, karena hasil pemeriksaan hanya boleh diketahui tim dan atasan.” (informan 3)

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan penerapan nyata prinsip kode etik auditor dan pengaruh positif akuntansi keperilakuan terhadap profesionalisme auditor.

3.2 Indikator Kinerja Pemeriksaan

3.2.1 Kualitas

Berdasarkan hasil wawancara di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diketahui sebagian besar auditor menilai bahwa hasil pemeriksaan mereka telah sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan kertas kerja. Seperti yang dijelaskan oleh informan 2 dan 3 :

“Saya rasa kualitas hasil pemeriksaan saya sudah baik, semua laporan yang kami terbitkan kualitasnya bagus, berdasarkan fakta, dan juga sesuai standar audit yang kami pakai.” (informan 2)

“Kami para auditor dan ppud selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya pada saat melakukan reviu perencanaan dan anggaran kami menyusun kertas kerja berdasarkan Permendagri No 9 dan 10 Tahun 2018, disitu sudah tersedia susunan kertas kerja, contoh-contoh laporan serta aturan-aturan yang harus kami sebagai auditor dan ppud patuhi.” (informan 3)

Informan 1 juga menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan yaitu :

“Perencanaan audit (studi awal & penetapan tujuan), Pengumpulan bukti (wawancara, dokumen, observasi), Analisis temuan dan dokumentasi kertas kerja, Diskusi hasil dengan auditee, Penyusunan laporan audit, Tindak lanjut atas rekomendasi.” (informan 1)

Hal ini menunjukkan bahwa auditor di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memahami standar audit dan akuntansi.

3.2.2 Kuantitas

Berdasarkan hasil wawancara di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para auditor menilai bahwa jumlah pekerjaan yang diberikan masih dalam batas kemampuan. Namun, mereka juga mengakui adanya beban kerja yang meningkat terutama ketika menerima permintaan audit di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tidak dialokasikan dalam anggaran.

“Saya rasa untuk jumlah pekerjaan sudah sesuai dengan kemampuan saya, hanya saja terkadang ada satu permintaan diluar dari PKPT yang tidak tertata di anggaran menjadi beban kerja bagi kami.” (informan 2)

Para auditor juga harus bisa mengatur atau membagi waktu dalam menyelesaikan tugas pemeriksaan. Seperti yang dikatakan informan 1:

“Kami membagi waktu kerja secara sistematis sesuai dengan tahapan audit yang sudah ditetapkan dalam program kerja. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan punya alokasi waktu tersendiri. Saya pribadi menggunakan jadwal rinci harian, dan memastikan setiap anggota tim memahami tenggat waktunya. Disiplin waktu sangat penting, karena jika satu tahap molor, akan berdampak ke keseluruhan timeline pemeriksaan.” (informan 1)

Pada saat melakukan pemeriksaan para auditor juga tidak luput dari tekanan waktu. Informan 1 dan 2 menjelaskan:

Ya, tekanan waktu itu hampir pasti terjadi, apalagi kalau pemeriksaan bersifat mendesak atau waktunya berdekatan dengan batas pelaporan.

Untuk menghadapinya, saya biasanya langsung reorganisasi jadwal kerja tim dan fokus pada prioritas temuan. Kami juga mempercepat review internal tanpa mengurangi ketelitian. Disiplin kerja dan komunikasi yang tegas sangat membantu dalam situasi seperti ini.” (informan 1)

“Saya hadapi dengan komunikasi terbuka dalam tim, atur ulang strategi, dan jaga kerja sama agar tekanan tidak mengganggu hasil.” (informan 2)

1. Tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara informan 1 menyatakan adanya tantangan administratif dan teknis.

“Tantangan paling susah yaitu pertama memberikan pengertian kepada mereka (auditee) tentang bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan. Yang kedua tidak semua SDM yang ada di SKPD yang menjadi auditee paham terhadap pekerjaannya.” (informan 1)

Informan 2 dan 3 juga menambahkan bahwa adanya risiko psikologis dan hukum pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan.

“Menghadapi resiko psikologis, fisik, dan hukum.” (informan 2)

“Resiko hukum. Pada saat pemeriksaan di lapangan kami juga harus bersedia jika suatu saat instansi yang kami periksa mengalami masalah hukum, kami bersedia untuk diperiksa pihak yang berwajib. Dan juga terkadang pada saat dilapangan kami bisa mengalami pengancaman sehingga hal itu sangat menguji mental kami.” (informan 3)

Namun, walaupun terjadi kendala pada saat pelaksanaan audit tetapi para auditor mampu menyelesaikannya, seperti yang dijelaskan oleh informan 1:

“Saya identifikasi dulu sumber kendala, lalu koordinasi dengan tim dan atasan. Jika perlu, kami revisi pendekatan tanpa melanggar prosedur.” (informan 1)

4. KESIMPULAN

1. Kompetensi APIP berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
2. Pengetahuan auditor yang diperoleh melalui pelatihan, sertifikasi, serta program pengembangan lainnya mendukung pelaksanaan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.
3. Keterampilan auditor, dalam menggunakan teknologi, mengatur waktu, dan berkomunikasi efektif membantu proses pemeriksaan berjalan efisien dan tepat sasaran.
4. Perilaku profesional auditor, antara lain integritas dan tanggung jawab memperkuat akuntabilitas serta kualitas hasil pemeriksaan.
5. Kombinasi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
6. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh APIP, maka akan semakin tinggi pula kinerja pemeriksaan yang dicapai, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah.

REFERENSI

- [1] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi 1, Cetakan 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019. ISBN: 978-602-425-945-7.
- [2] M. R. Rantung, R. N. Taroreh, dan G. M. Sendow, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Penempatan Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 11, no. 4, pp. 1718–1730, 2023, doi: 10.35794/emba.v11i4.53570.
- [3] C. S. T. Laloan, L. Kalangi, dan H. Gamaliel, “Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit dan Independensi Auditor dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, vol. 12, no. 2, pp. 129–141, 2021, doi: 10.35800/jjs.v12i2.36079.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018. ISBN: 978-602-289-313-4.
- [5] N. Harahap, *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020. ISBN: 978-623-94003-0-6.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi 2. Bandung: Alfabeta, 2019. ISBN: 978-602-425-015-7.
- [7] A. I. Lubis, *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma*, Edisi 3, disunting oleh E. S. Suharsi dan B. Hernalyk. Jakarta: Salemba Empat, 2018. ISBN: 978-979-061-817-7.
- [8] S. Amsari dan A. Husna, “The Effect of Competence and Accountability on the Performance of Government Auditors,” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 8, no. 2, pp. 192–204, 2022, doi: 10.35870/jemsi.v8i2.631.
- [9] A. Agus dan Y. Fadli, “Pengaruh Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DER) Terhadap Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening,” *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, vol. 2, no. 1, pp. 17–38, 2022, doi: 10.29240/disclosure.v2i1.4531.
- [10] A. Alfyyul, “Analisis Penentuan Biaya Pembuatan Akta Jual Beli pada Kantor Notaris dan PPAT ‘X’ Dilihat dari Aspek Akuntansi Keperilakuan (Studi pada Kantor Notaris dan PPAT X di Sidoarjo),” Skripsi, STIE Mahardhika, Surabaya, 2019. [Online]. Available: <https://repository.stiemahardhika.ac.id/1779>